

Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan (Studi Pada Kampung Nelayan Di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku)

Zarita Kaulika R Wattimena

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

email : Zaritawattimena97@mail.ugm.ac.id

Rustadi

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

email : rustadi@ugm.ac.id

Suadi

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

email : Suadi@ugm.ac.id

Dikirim; 03-02-2022; Direvisi; 25-04-2022; Diterima; 19-05-2022

ABSTRACT

This study aimed to analyzed the role of Department of Fishery of Seram Bagian Timur Regency using the Siagian theory in 2003, through 5 role indicators namely the role of stabilizer, innovator, moderniz, pioneer and implementer as well as the implications of the role of the service on the economic resilience of fishermen's families which included: place of residence (home ownership) , income, education costs and health insurance in Bula Fisherman's Village SBT Regency.

This research was a qualitative descriptive study, with data collection techniques using qualitative methods with samples of 6 informants from the officers in the Fisheries Services and 5 fishers informants representing 3 fish farmer groups. The data collection techniques used were (1) observation (2) interviews, and (3) documentation with data analysis techniques through qualitative description analysis which drew conclusions analytically through the stages of data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of the study indicated that Department of Fishery of SBT Regency had not carried out its main duties and functions optimally. The limitations of its implementation, both the role and implementation of policies, were still hampered by a number of factors, namely budget constraints, low quality of human resources, government policies and inadequate facilities and infrastructure. So, that the local governments had not been effective in managing and utilizing fishery resources. The implication of the role of Office of Fishery of SBT in empowering fishermen showed that it still had not had a positive influence on the economic condition of the fishermen's families, most of the fishing families had family economic resilience that was included in the less resilient category, namely there were still many family of fisherman who lived in poverty. In order to supported the success of the role of the Department of Fisheries, a number of supporting factors were needed that could encourage the regional economy through marine and fisheries-based regional development, namely fishery resources, human resources and government policies (budget).

Keywords: Fisheries Service Role; Empowerment of Fishermen Communities; Fishermen Family Economic Resilience.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perikanan Kab.SBT dengan menggunakan teori Siagian tahun 2003, melalui 5 indikator peran yakni peran selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana serta implikasi dari peran dinas terhadap ketahanan ekonomi keluarga nelayan yang meliputi: tempat tinggal (kepemilikan rumah), pendapatan, biaya pendidikan dan jaminan kesehatan di Kampung Nelayan Bula Kab.SBT.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perikanan yang terdiri dari 6 informan, dengan subjek pendukung adalah 3 kelompok nelayan yang masing-masing diwakili 5 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) observasi (2) wawancara, dan (3) dokumentasi dengan teknik analisis data melalui analisis deskripsi kualitatif yang mengambil kesimpulan secara analitik melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kab.SBT belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Keterbatasan pelaksanaannya, baik peran maupun implementasi kebijakan masih terhambat sejumlah faktor, yaitu keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kebijakan pemerintah serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Dengan demikian, pemerintah daerah belum efektif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan. Implikasi peran Dinas Perikanan Kab.SBT dalam pemberdayaan nelayan menunjukkan masih belum memberikan pengaruh positif terhadap kondisi perekonomian keluarga nelayan, sebagian besar keluarga nelayan memiliki ketahanan ekonomi keluarga yang masuk dalam kategori kurang tahan, yakni masih banyak keluarga nelayan yang hidup serba kekurangan. Guna mendukung keberhasilan peran Dinas Perikanan diperlukan sejumlah faktor pendukung yang bisa mendorong perekonomian daerah melalui pembangunan daerah berbasis kelautan dan perikanan yakni faktor sumber daya perikanan, sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah (anggaran).

Kata Kunci: Peran Dinas Perikanan; Pemberdayaan Masyarakat Nelayan; Ketahanan Ekonomi keluarga Nelayan.

PENGANTAR

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau ± 17.449 pulau, dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 Km² (Mat, 2017). Sepanjang wilayah pesisir pantai, terdapat sumber kekayaan alam yang melimpah. Pemerintah pun sedang giat-giatnya untuk mengembangkan perekonomian rakyat, melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah juga terus menguatkan jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia, namun masyarakat nelayan justru hanya sebagai penonton (Triaji, 2021).

Sebagian besar masyarakat nelayan Indonesia, belum dapat memaksimalkan potensi dari kekayaan laut Indonesia, oleh karena itu diperlukan suatu terobosan yang bisa membuka akses para nelayan untuk dapat meningkatkan modal, teknologi, ketrampilan bahkan kultur yang berkesinambungan untuk

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

Maluku yang merupakan salah satu provinsi kepulauan di wilayah timur, terkenal memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Berdasarkan data KKP (2019), terdapat 3 kategori dalam pemetaan wilayah potensi perikanan dan kelautan: (1) Untuk WPPNRI (714) Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, memiliki potensi lestari ikan sebanyak 788.939 ton /tahun. (2) Untuk WPPNRI (715) Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau memiliki potensi ikan 1.242.526 ton /tahun. (3) Untuk WPPNRI (718) Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur memiliki potensi ikan 2.637.565 ton /tahun. Dengan Potensi sumber daya perikanan yang dimiliki ini, seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan

Sejalan dengan itu, Kabupaten Seram Bagian Timur (Kab.SBT) yang masuk dalam bagian dari wilayah Provinsi Maluku, adalah wilayah kepulauan yang di dominasi oleh pulau-pulau kecil sebanyak 45 pulau dan luasan sebesar 20.656.894 km² yang terdiri dari luas wilayah laut 14.877.771 Km² (72,02%) dan Luas Wilayah Darat 5.779.123 Km² (27,98%).

Wilayah Kab.SBT, memiliki potensi sumber daya laut yang sangat melimpah diantaranya seperti mangrove, padang lamun, algae, dan terumbu karang serta sumber daya ikan seperti molusca, echinodermata dan crustaceae (BPS, 2021). Pemerintah Daerah Kab.SBT terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, salah satunya sektor perikanan. Volume Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kab. SBT dihasilkan sebesar 14.158.881 ton/tahun. Dengan jumlah produksi yakni Rp. 927.762.270.000 (KKP, 2019).

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Kab.SBT memiliki potensi perikanan yang luar biasa, dengan demikian diperlukan sarana prasarana perikanan yang memadai guna mengembangkan potensi perikanan yang tersimpan. Permasalahan saat ini ialah pemerintah daerah terus berusaha guna memenuhi kebutuhan tersebut, namun APBD yang ada cukup terbatas.

Peran pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan di Kab. SBT, berdasarkan hasil wawancara oleh Dinas Perikanan Provinsi Maluku pada tahun 2019 lalu, bahwa masyarakat nelayan yang menempati wilayah pesisir di Kecamatan Bula (Kampung Nelayan), masih minimnya akan pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya laut yang di akibatkan kurangnya pelatihan dan masih minimnya akan pengetahuan

dalam pengelolaan sumber daya laut yang di akibatkan kurangnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah daerah dan pemberian bantuan sosial berupa perahu, jaring dan alat tangkap lainnya yang kurang tepat sasaran.

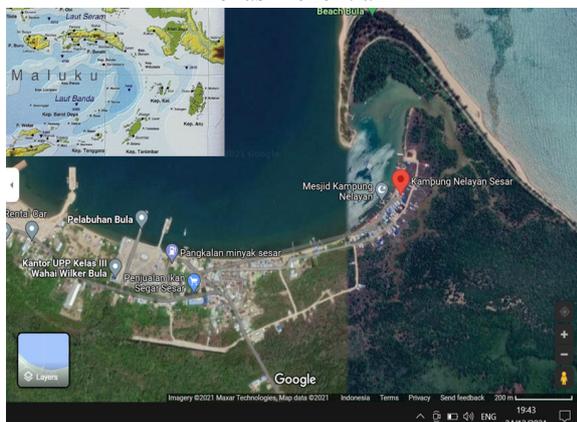
Hal seperti ini berpotensi berdampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga nelayan, para keluarga nelayan yang ada di Kampung Nelayan Bula, misalnya dari pendapatan keluarga nelayan disana yang masih di bawah rata-rata, tingkat pendidikan nelayan maupun keluarga nelayan yang masih sangat rendah serta keterbatasan kepemilikan lahan di daratan. Sungguh sangat disayangkan, jika profesi nelayan yang menjadi ujung tombak industri penangkapan ikan dan sumber pendapatan nelayan masih banyak yang memprihatinkan.

Selain itu juga, berdasarkan Peraturan perundang-undangan No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang secara tidak langsung memberi batasan wilayah kewenangan kepada Dinas Perikanan Kab.SBT dalam mengelola sumber daya laut, wilayah kekuasaan di kabupaten hanya dari wilayah pesisir sampai ke daratan, dengan demikian berdampak terhadap kinerja dari Dinas Perikanan yang dibatasi oleh regulasi dalam pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Namun demikian, sesuai perundangan tersebut pemerintah kabupaten seperti Kab. SBT, melalui Dinas Perikanan berperan dan berwenang menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat nelayan kecil. Karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang: "*Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan Dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga nelayan (Studi*

Pada Kampung Nelayan di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

Penelitian empiris tentang peran dinas perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yang dikaitkan dengan ketahanan ekonomi keluarga masih sangat terbatas, apalagi di wilayah timur Indonesia. Kampung Nelayan Bula dipilih sebagai objek penelitian karena dijadikan kampung prioritas bagi Dinas Perikanan Kab.SBT dalam memberikan pelatihan maupun bantuan bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan dan menggunakan sumber daya perikanan dengan baik guna meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab hampir seluruh hasil produksi perikanan tangkap yang dihasilkan di Kecamatan Bula paling banyak berasal dari kampung nelayan tersebut (Lihat Gambar 1).

Gambar 1
Lokasi Penelitian



Sumber: Olahan peneliti, 2021.

Dalam penelitian digunakan landasan teori, yaitu teori peran, pemberdayaan, dan ketahanan ekonomi keluarga. Secara lebih rinci dapat diikuti penjelasan sebagai berikut.

Pertama, teori peran. Menurut Soekanto (2002), peran adalah aspek yang memiliki kedudukan dinamis, jika seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukannya, maka ia telah menjalani suatu peranan, sedangkan status ialah hak dan kewajiban yang berbanding dengan kedudukannya untuk menjalankan fungsinya. Aspek dari Peran dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu (1). Peran berkaitan langsung antara orang dan perilaku, (2). Perilaku yang timbul dalam interaksi tersebut, (3). Orang-orang yang mengambil bagian pada interaksi social, (4). Adanya kedudukan orang-orang dalam berperilaku (Biddle dan Thomas, 1966).

Pemerintah untuk dapat memainkan peranannya dalam pembangunan nasional. Mengutip teori dari Siagian (2003), bahwa dalam proses pembangunan pemerintah, peran yang dominan dan akan disoroti ialah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri. Peran selaku stabilisator, untuk dapat mewujudkan suatu perubahan, agar tidak mengubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi menjadi suatu ancaman nasional, kesatuan dan persatuan bangsa. Peran selaku inovator ialah produk dari kreativitas pemerintah. Jika ditinjau dari aspek administrasi pemerintahan, pembangunan merupakan terobosan atau inovasi, yang berarti suatu temuan baru, baik metode maupun sistem yang baru, Peran sebagai modernisator ialah menjadikan pemerintahan yang kuat, dan mandiri. Untuk dapat memberikan pembangunan yang maju, maka perlunya penguasaan di ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial ASN, keahlian dalam mengolah hasil kekayaan alam yang dimiliki, peran selaku pelopor, peran dari pemerintah harus dapat menjadi panutan dan contoh yang baik bagi seluruh masyarakat (*role model*) serta Dalam memainkan peran sebagai pelaksana, dalam halnya untuk

menjalankan misi pembangunan, pemerintah harus memiliki tanggung jawab nasional, yang bukan untuk menjadi beban.

Kedua, teori pemberdayaan. Menurut Adimihardja (2001), pemberdayaan masyarakat ialah suatu strategi besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people based development*). Pendekatan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Pemberdayaan adalah salah satu cara memaksimalkan segala potensi ide, tenaga, dan kemauan masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang membelenggu mereka. Inovasi yang kreatif dan ramah terhadap lingkungan tentunya menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan itu sendiri. Atas dasar konsep tersebut, maka pemberdayaan nelayan, didefinisikan sebagai segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk mendukung aktivitas aau kegiatannya di bidang perikanan serta meningkatkan ketahanan ekonomi keluarganya ke arah yang lebih baik.

Ketiga, teori ketahanan ekonomi keluarga. Dalam ketahanan (*resilience*) terdapat apa yang disebut sebagai kata kunci ketahanan yang diartikan sebagai kemampuan akan tahan terhadap setiap kondisi yang mengancam baik dari dalam maupun dari luar untuk seorang individu, kelompok, komunitas dan bangsa. Ketahanan ekonomi merupakan bentuk mikro dari ketahanan nasional. Ketahanan ekonomi keluarga terletak pada dinamika potensi dan kondisi,

untuk dapat mempertahankan kesinambungan ekonomi keluarga. Terlihat baik dan adil, jika pendistribusian dari pendapatan dan partisipasi dalam produksi pendapatan keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga akan semakin baik, bila kebutuhan barang/jasa terjamin dan tercukupi (Lemhannas, 1997:62).

Kebijakan dan program pembangunan, mampu dikembangkan dengan berbagai usaha intervensi dari dalam melalui upaya dengan memberdayakan keluarga sebagai unit paling kecil dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Suyono (1991), untuk menjadikan setiap keluarga di Indonesia sebagai unit pembangunan yang mampu untuk membangun setiap anggota keluarganya, perlunya dukungan dari masyarakat sekelilingnya, serta nusa dan bangsa. Ketahanan keluarga meliputi ketahanan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam model mikro ketahanan nasional sebagai salah satu bentuk yang digunakan untuk menjabarkan kondisi ketahanan pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat ataupun sektoral.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif murni (Sugiyono, 2016), sedangkan untuk data primer dan sekunder, ditempuh melalui informan dari Dinas Perikanan sebanyak 6 orang, kemudian dari kelompok masyarakat nelayan sebanyak 3 kelompok, terdiri dari 5 informan setiap kelompok yaitu Tuna Fajar Timur dan Tatihu yang berlokasi di Kampung Nelayan Bula.

Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap informan dalam penelitian (Sugiyono, 2016). Serta teknik analisis data penelitian melalui: Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan (Milles dan Huberman, 1984). Dari semua informan tersebut, reduksi data yang diambil melalui teknik triangulasi, dengan diperbantukan pada

wawancara mendalam dan *interview guide*, observasi dan dokumentasi. Pendalaman tentang informasi yang dibutuhkan peneliti dan dapat diwakilkan dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk penelitian. Adapun kriteria yang ditentukan, sebagai berikut.

Pertama, Dinas Perikanan Kab.SBT : (1). Yang mengetahui tupoksi dari Dinas Perikanan Kab.SBT; (2). Menguasai tentang potensi perikanan daerah dan kondisi masyarakat nelayan; (3). Yang bertanggungjawab dan menjalankan program pemberdayaan di Dinas Perikanan Kab.SBT

Berdasarkan kriteria di atas, maka subjek penelitian untuk menentukan informasi dan memberikan data-data yang dibutuhkan peneliti yang berasal dari Dinas Perikanan Kab.SBT ialah terdiri dari beberapa informan yakni kepala dinas/Sekretaris, kepala bidang penangkapan, kepala bidang budidaya, kepala seksi TPI, Kasubag perencanaan dan keuangan dan staff dinas perikanan.

Kedua, kelompok nelayan : (1). Masyarakat Kampung Nelayan Bula; (2). Berprofesi sebagai nelayan tetap.

Berdasarkan kriteria di atas, maka subjek penelitian untuk menentukan informasi dan memberikan data-data yang dibutuhkan peneliti yang berasal dari masyarakat Kampung Nelayan ialah terdiri atas 3 kelompok nelayan yaitu kelompok tuna, fajar timur dan tatihu dengan jumlah total informan 15 orang.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kab.SBT sebagai organisasi perangkat daerah di Lingkungan Kab.SBT, keberhasilannya dalam mencapai tujuan, sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi dari instansi pembangunan lainnya dan tanpa terkecuali masyarakat yang

sebagai tujuan dari pelaksanaan program pemerintah daerah. Dengan demikian Dinas Perikanan Kab.SBT, diharuskan untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan, dalam memberikan pelayanan terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta membangun daerah melalui sektor perikanan dan kelautan.

Pemerintah Kab.SBT melalui Dinas Perikanan memainkan peran yang dominan dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan serta implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga nelayan. Untuk memahami peran Dinas Perikanan tersebut, peneliti mengadopsi teori peran yang dijelaskan oleh Siagian (2003), yang meliputi peran sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Untuk menjelaskan aktualisasi peran tersebut, peneliti melakukan kajian terhadap program kerja Dinas Perikanan Kab.SBT, sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.

Tabel 1
Program Kegiatan Dinas Perikanan Kab.SBT 2019-2020

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Penyusunan Data Statistik Budidaya Perikanan
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap
3	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Cold Storage
4	Program Pemberdayaan Usaha Masyarakat	Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK) Sosialisasi dan Pendataan administrasi kartu nelayan dan asuransi nelayan Gerakan Gemar Makan Ikan

Sumber: Data Dinas Perikanan Kab.SBT (2020)

Secara lebih rinci peran Dinas Perikanan Kab. SBT tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

Pertama, stabilisator. Sebagai stabilisator, Dinas Perikanan Kab.SBT memiliki peranan penting, yakni mampu mewujudkan kondisi lingkungan yang stabil, agar pembangunan di bidang perikanan dan kelautan dapat berjalan dengan efektif termasuk mendukung stabilitas produksi perikanan dan perekonomian nelayan. Peran stabilisator tersebut ditunjukkan Dinas Perikanan Kab. SBT dalam berbagai upaya sebagai berikut.

(1). Menjaga stabilitas perekonomian nelayan. Peran Dinas Perikanan Kab. SBT dalam perekonomian keluarga masyarakat nelayan, sama halnya dengan kepala rumah tangga yang bekerja keras dan berupaya untuk mempertahankan keseimbangan kondisi perekonomian keluarganya. Peran stabilisator Dinas Perikanan dapat dilihat dari capaian program yang telah dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.

Berdasarkan data capaian program Dinas Perikanan di atas, dari dua tahun terakhir 2019-2020, Dinas Perikanan Kab. SBT telah mengalami peningkatan presentase capaian program, hal ini tentu dilihat dari capaian pada tahun 2019 sebesar 94,64% meningkat menjadi 99,90% pada tahun 2020. Artinya bahwa peran dari Dinas Perikanan Kab.SBT dalam memberikan Bantuan kepada masyarakat nelayan telah tepat, melalui program yang telah dilaksanakan mengartikan bahwa, salah satu bentuk pengembangan dan pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat nelayan, hal ini sangat mempermudah dan membantu masyarakat nelayan Kab.SBT khususnya Desa Sesar Kampung Nelayan dalam perekonomian keluarga nelayan.

Tabel 2
Data Capaian Program Kegiatan Dinas Perikanan Kab.SBT Tahun 2019-2020

No	Nama Program	Kegiatan
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Penyusunan Data Statistik Budidaya Perikanan
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap
3	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Cold Storage
4	Program Pemberdayaan Usaha Masyarakat	Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK) Sosialisasi dan Pendataan administrasi kartu nelayan dan asuransi nelayan Gerakan Gemar Makan Ikan

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan peneliti yaitu Kepala Bidang Penangkapan, Bapak La Mance, S.Pi. sebagai berikut:

“Program pemberian bansos berupa sarpras alat tangkap ini sudah sering kami salurkan ke masyarakat nelayan khususnya di Kampung Nelayan mbak, selain pemberian bansos ini juga kami turut mengikutsertakan istri-istri para nelayan ini untuk membuka usaha kecil seperti berjualan, dll, karna kalau cuma berharap dari hasil tangkapan para nelayan ini tentu tidak cukup, apalagi kalau sudah musim timur sudah pasti para nelayan tidak bisa pergi melaut, maka dari itu salah satu strategi kami dalam membantu perekonomian para keluarga nelayan melalui pemberdayaan istri-istri para nelayan mbak” (Wawancara 5 Juli 2020 Jam 14.00 WIT).

Dinas Perikanan memberikan bantuan kepada nelayan seperti pemberian sarana prasana

alat tangkap dan budidaya. Kampung nelayan di Desa Sesar pada umumnya lebih cenderung ke penangkapan. Dengan demikian, oleh Dinas Perikanan Kab. SBT telah membuat kelompok bersama kepada masyarakat nelayan dan selain membuat kelompok untuk para nelayan, istri-istri para nelayan juga diberdayakan dengan membuat kelompok usaha kecil, hasil dari tangkapan ikan kemudian dapat diolah menjadi ikan asap. Agar dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga nelayan, dan juga masyarakat nelayan tidak hanya menggantungkan hidupnya pada hasil penangkapan ikan saja. Sebagaimana dijelaskan Kaswandi (2017) ,naiknya tingkat pendapatan masyarakat nelayan artinya adanya perbaikan perekonomian masyarakat yang lebih makmur.

Parameter aspek pendapatan pada ketahanan ekonomi keluarga nelayan dapat juga dilihat dari produktivitas usaha yang dilakukannya. Untuk meningkatkan produktivitas perikanan, Dinas Perikanan Kab.SBT menyelenggarakan program bantuan sarana prasarana perikanan kepada nelayan. Bantuan yang diberikan ini berdampak pada keluarga nelayan, bukan hanya pada nelayan laki-laki, tetapi juga istri nelayan.

(2). Menjaga ketertiban masyarakat nelayan dalam mengelola sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Peran dari Dinas Perikanan Kab. SBT dalam menjaga ketertiban masyarakat nelayan ialah dengan melibatkan masyarakat lokal (masyarakat nelayan) maupun masyarakat hukum adat (MHA) dalam bidang pengawasan wilayah laut. Cara tersebut dilakukan agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin terlihat.

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perikanan Kab. SBT, dengan Bapak H. Jahdi Marasabessy, S.Pi., M.MP.:

“Upaya kami dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sosial di tengah-tengah masyarakat nelayan, salah satunya dengan melibatkan mereka untuk ikut berperan aktif dalam program pemerintah ini, karena program ini tidak akan tercapai dan berhasil jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Selain masyarakat lokal, kami juga melibatkan masyarakat hukum adat. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Cara ini kami lakukan agar masyarakat merasa diberi kepercayaan, serta nelayan kecil akan diarahkan untuk dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan dalam mengelola wilayah perairan, tak lupa pula ditanamkan tentang melaksanakan perlindungan ekosistem pesisir dan laut” (Wawancara 30 Juni 2021, Jam 10.00 WIT).

Namun, saat ini upaya dari Dinas Perikanan Kab. SBT sudah tidak dapat berjalan sesuai dengan rencananya, guna menciptakan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, terkait dengan pembagian kewenangan tugas dan fungsi dari Dinas Perikanan di pemerintah daerah kabupaten/kota beserta pemerintah provinsi.

Saat ini, untuk tugas dan fungsi dari Dinas Perikanan di kabupaten/kota baik di bidang pengawasan wilayah penangkapan dan di bidang pulau pesisir sudah tidak dilakukan oleh Dinas Perikanan tetapi oleh pemerintah provinsi sesuai arahan UU No.23/2014 dan Permendagri No.90/2019. Sekretaris Dinas Perikanan Kab.SBT lebih lanjut menjelaskan bahwa :

“Akibat dari regulasi yang mengharuskan beberapa kewenangan daerah dikembalikan ke pusat, salah satunya adalah tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan bidang pesisir, sungguh regulasi tersebut memberatkan bagi kami selaku anak daerah, karena hal tersebut telah membatasi ruang

gerak kami dalam mengelola, mengawasi dan mengembangkan sumber daya laut yang kami miliki khususnya di kelautan, bagaimana tidak daerah yang kami tinggali ini adalah daerah yang sebagian besarnya adalah laut bukan daerah hamparan, di ibaratkan bangun tidur buka mata depannya ada laut. Tapi dalam konteks kewenangan jika terjadi apa-apa, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena harus berkoordinasi dengan Provinsi terlebih dahulu untuk mengambil langkah. Untuk Itu yang menurut saya, regulasi ini menjadikan tugas dari Dinas Perikanan Kab. SBT tidak berjalan secara efektif dan efisien". (Wawancara 30 Juni 2021, Jam 10.15 WIT).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pemerintah Kab.BT menilai regulasi yang ada cenderung semakin terpusat pada pemerintah pusat dan provinsi, sementara potensi sumber daya kelautan yang dimiliki ada di daerah kabupaten/kota. Akibatnya daerah terutama kabupaten kurang mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan secara baik. Undang-undang tersebut, saat ini belum memiliki regulasi lanjutannya, dengan demikian hal ini telah berpengaruh terhadap sistem, urusan tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi maupun pemerintah kabupaten, salah satunya, berkaitan dengan kebutuhan revisi tupoksi dari Dinas Perikanan provinsi dan Dinas Perikanan kabupaten terkait bidang pengawasan wilayah penangkapan dan bidang pulau pesisir.

(3). Mengoptimalan produksi perikanan tangkap. Dinas Perikanan Kab. SBT dapat berperan dalam percepatan dan pengendalian produksi perikanan tangkap, dengan memberikan pelayanan yang mampu mendorong dan mendukung perkembangan kegiatan kenelayanan, terutama dalam bentuk

program kegiatan Dinas Perikanan yang secara langsung terkait upaya tersebut. Namun sampai saat ini upaya yang dilakukan belum cukup optimal.

Sebagaimana lanjutan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Perikanan Kab. SBT, yakni Bapak H. Jahdi Marasabessy, S.Pi., M.MP. yang menjelaskan:

"Saat ini untuk pengendalian produksi perikanan memang belum maksimal, kita menyadari bahwa potensi laut kita sangat luar biasa. Kami berupaya untuk memaksimalkan sarana dan prasarana terlebih dahulu. Terutama peralatan nelayan, alat yang kita berikan setidaknya cukup membantu nelayan untuk meningkatkan produksinya, bagaimanapun nantinya harus kita bantu dan pendampingan terus menerus. Hanya saja, program-program yang diberikan, seperti program pengembangan perikanan ini belum bisa 100% baik. Setidaknya sudah bisa berjalan untuk nelayan, tinggal monev saja yang perlu perhatian khusus, jangan hanya dibebankan pada Pemda saja, tapi pemerintah pusat juga harus turun kelapangan, mendengarkan juga aspirasi masyarakat setempat". (Wawancara 30 Juni 2021, Jam 10.22 WIT).

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa Dinas Perikanan Kab.SBT terus menerus berupaya meningkatkan kinerja perikanan tangkap melalui program peningkatan produksi perikanan tangkap, di antaranya melalui penyediaan sarpras alat tangkap yang ramah lingkungan serta membuka jaringan pasar hasil perikanan dari nelayan di kampung nelayan, baik untuk pasar lokal, antar pulau maupun pasar luar negeri. Namun demikian, pengembangan sektor ini, di Kab.SBT dihadapkan juga pada tantangannya banyak pulau kecil yang membuat sulitnya pengawasan, sehingga kadang terjadi *illegal fishing*.

Kedua, inovator. Sebagai Inovator, Dinas Perikanan Kab.SBT mampu menciptakan hal-hal kreatif yang mampu mencapai keberhasilan program pembangunan di bidang perikanan dan kelautan yang sudah direncanakan. Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga nelayan di kampung nelayan, Dinas Perikanan Kab.SBT selaku inovator, telah merealisasikan program dalam bentuk tindakan.. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah saat ini sebagai berikut.

(1). Program pengembangan perikanan tangkap. Melalui pengembangan usaha perikanan di bidang penangkapan, berikut beberapa program yang telah dicapai dalam kegiatan operasional, yang terdiri atas: (a). Inventarisasi paket bantuan perikanan, dengan capaian 99,95% dari target 100%. (b). Seleksi dan Identifikasi Calon Penerima bantuan perikanan tangkap, dengan capaian 99,97% dari target 100%. (c). Penyediaan data statistik perikanan tangkap, dengan capaian 99,98% dari target 100%. (d). Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan kartu nelayan, dengan capaian 99,89% dari target 100%. (e). Inventarisasi potensi dan produksi perikanan di bidang penangkapan, dengan capaian 99,98% dari target 100%. (f). Ketersediaan sarpras perikanan tangkap dan alat bantu penangkapan, dengan capaian 99,97% dari target 100%

Berdasarkan data program tersebut, tindakan dari Dinas Perikanan Kab. SBT sebagai inovator dalam peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat nelayan, sudah terlihat jelas dengan tindakan melalui program yang telah diberikan, baik dari proses inventarisasi sampai pada penyediaan data maupun fasilitas sarpras. Contohnya penyediaan sarpras perikanan alat bantu penangkapan.

Dari data yang peneliti dapat melalui dokumen Rencana strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Perikanan Kab.SBT. Bahwa peran pemerintah daerah dalam suatu pelaksanaan tugas (baik program, kegiatan yang menjadi tindakan), akan berpengaruh jika adanya faktor yang menyebabkan suatu kebijakan (program) tidak terealisasi baik, yakni dalam menjalankannya harus sesuai dengan norma-norma pemerintahan.

Bahkan, masyarakat nelayan yang dijadikan sasaran dalam pelaksanaan program pemerintah tidak bisa mengikuti proses pelaksanaan program, jika masih belum adanya kesadaran, kejelasan dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Perikanan Kab.SBT kepada masyarakat nelayan. Akhirnya mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat yang tentunya akan mempengaruhi berjalannya suatu pelaksanaan program. Oleh karena itu, menurut peneliti dalam implementasi program maupun tindakan tersebut, berimplikasi dan harus menjadi perhatian bersama, demikian dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) hal, yakni (a). Pemahaman masyarakat dalam menjalankan program di bidang penangkapan untuk mendapatkan bantuan. (b). Tranparansi program di bidang perikanan tangkap. (c). Sejauhmana sosialisasi program yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah

(2). Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Berdasarkan Data Renstra 2016-2021 Dinas Perikanan Kab.SBT, berikut beberapa program yang diterapkan melalui kegiatan dengan tujuan untuk peningkatan kuliatas produksi pengolahan perikanan: (a). Identifikasi tempat atau titik lokasi utama produksi ikan, sebagai tempat pelelangan ikan, sarana dan prasarana dengan tujuan pembangunan. (b). Penyusunan model awal tempat pelelangan

ikan. (c). Pengembangan fasilitas penunjang sarana dan prasarana TPI. (d). Pemantauan perkembangan dan fluktuasi harga ikan. (e). Ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan, pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan yang memadai. (f). Diversifikasi pengolahan hasil perikanan.

Dari ke-enam program tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai keberhasilan suatu program perikanan, maka akan muncul pertanyaan yang berkaitan dengan peran Dinas Perikanan Kab.SBT sebagai pelaku inovator dengan bantuan program perikanan yang telah diberikan selama ini, sudah berjalan efektif atau belum tepat sasaran.

Selain itu, kebanyakan dari masyarakat nelayan yang mengakui bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa sarana prasarana masih belum mereka dapatkan. Bahkan, bantuan yang diberikan juga diketahui tidak sedikit yang salah arah dan tidak tepat sasaran, Hal ini disebabkan karenanya kurangnya pengawasan oleh pemerintah sebelum dan sesudah menyalurkan bantuan.

Hal ini menjadi opini masyarakat lokal, baik nelayan maupun masyarakat hukum adat (MHA) yang merasa kurangnya perhatian dan pengawasan dari Pemerintah Daerah Kab. SBT. Akhirnya optimalisasi untuk pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dari pemerintah kepada masyarakat belum efektif dan bermanfaat baik dalam peranan tugas dan fungsi dari Dinas Perikanan Kab. SBT sebagai pelaku Inovator.

(3). Program pemberdayaan usaha masyarakat nelayan pesisir. Dalam peningkatan kualitas produksi pengolahan perikanan, berikut beberapa program yang telah direalisasikan dalam kegiatan:

(a). Program pemberdayaan masyarakat nelayan, dengan capaian 99,89% dari target 100%. (b). Penyediaan sarpras untuk usaha masyarakat nelayan 99,8% dari target 100%. (c). Pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan nelayan dengan capaian 99,8% dari 100%

Dari program tersebut, berdampak juga pada peningkatan hasil dan kualitas produksi perikanan. Guna mencapai keberhasilan suatu program, Pemerintah Daerah Kab. SBT juga memiliki peran penting dalam mengupayakan pencapaian suatu program yang telah dijalankan, program tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan UU No.31/2004, yang membahas tentang perikanan telah diubah menjadi UU No.45/2009 yang menjelaskan bahwa perikanan merupakan segala bentuk aktivitas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungannya, yang dikelola dalam satu sistem bisnis perikanan.

Berdasarkan tinjauan yuridis tersebut, menjelaskan bahwa daerah yang mempunyai kawasan laut yang luas, maka daerah tersebut diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut yang tersedia, sumber daya perikanan yang digunakan bertujuan untuk kemakmuran masyarakat yang ada di wilayah tersebut, khususnya bagi masyarakat nelayan. Memanfaatkan potensi sumber daya perikanan ialah bagian dari upaya untuk meningkatkan sumber daya perikanan yang dimiliki serta mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui hasil sumber perikanan. Gambaran pengelolaan sumber daya perikanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang diharapkan mampu memberi peningkatan kualitas hidup para nelayan yang menempati wilayah pesisir,

yang sebagian besar bergantung pada hasil laut yang dihasilkan dan merupakan penjabaran dari pembangunan perikanan yang berkesinambungan.

(4). Program pemberdayaan masyarakat melalui gerakan gemar makan ikan. Sebagai inovator, Dinas Perikanan Kab.SBT mampu menciptakan suatu program yang nantinya dapat menunjang kehidupan para nelayan di ampung nelayan tersebut, misal melalui: program pemberdayaan usaha perikanan termasuk diversifikasi produk perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan. Program ini sering disebut “Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan” atau disingkat dengan “GEMARIKAN”. Sebenarnya GEMARIKAN ini merupakan program nasional yang dibuat sejak tahun 2004 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan untuk menyuarakan pentingnya manfaat memakan ikan sejak kecil, karena ikan mengandung banyak gizi dan tentu sangat penting bagi pertumbuhan dan kecerdasan otak.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kab.SBT, telah menjalankan program “GEMARIKAN” sejak tahun 2016 dan terus berlangsung sampai saat ini di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Bula Kampung Nelayan. Hasil Program ini di antaranya adalah makin meningkatnya konsumsi ikan masyarakat. Dengan demikian, angka kesehatan masyarakat di kampung nelayan tersebut sangat baik, masyarakat nelayan di kampung nelayan juga dilaporkan sangat baik. Masyarakat nelayan di kampung tersebut hampir tidak pernah mengalami keluhan sakit selama melaut, begitupun juga dengan anggota keluarga nelayan lainnya, baik yang mengalami kasus gizi buruk ataupun gangguan kesehatan.

Ketiga, modernisator. Sebagai modernisator, Dinas Perikanan Kab.SBT

harus bisa mengubah cara berpikir lama menjadi lebih modern, guna mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dalam membuat perencanaan program pembangunan kelautan dan perikanan di daerahnya, Dinas Perikanan Kab.SBT harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, demi meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat nelayan serta dapat mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Kab.SBT. Peran sebagai modernisator bisa dilihat pada berbagai upaya yang dijalankan sebagai berikut.

(1). Penguasaan ilmu pengetahuan teknologi melalui pemberdayaan masyarakat nelayan. Dinas Perikanan Kab. SBT sejauh ini belum memiliki solusi maupun strategi untuk penggunaan dan pemanfaatan pada teknologi modern, yang bisa diterapkan untuk memberdayakan masyarakat nelayan, baik di bidang penangkapan maupun budidaya dalam hal memberi ilmu pengetahuan maupun teknologi modern, guna meningkatkan hasil produksi perikanan di daerah yang lebih baik. Hampir sebagian besar masyarakat di Kab. SBT khususnya di kampung nelayan merupakan nelayan tradisional, masyarakat nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan hanya sebatas menggunakan alat tangkap tradisional, modal yang minim serta metode penangkapan yang cenderung sederhana.

Oleh karenanya, menjadi permasalahan utama dalam menghadapi tantangan ialah, kurangnya ketersediaan teknologi kelautan dan perikanan yang memadai, kemudian sumber permodalan yang digunakan untuk investasi masih sangat terbatas, yang mengakibatkan timbulnya kemiskinan yang masih melanda sebagian besar masyarakat yang menempati kawasan pesisir khususnya para nelayan kecil. Persoalan seperti ini diakibatkan oleh paradigma pembangunan pemerintah yang

masih lebih memprioritaskan pembangunan di darat dibandingkan pembangunan kelautan.

Sejalan pendapat Siswanto (2008), yang menyatakan bahwa masyarakat nelayan identik dengan kepemilikan aset yang terbatas, kekurangan modal, posisi tawar, dan akses pasar. Dalam jangka pendek, sektor kelautan dan perikanan diketahui dapat memberikan dampak bagi aktivitas produksi dari sektor lain dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Di samping itu, untuk jangka panjangnya, sektor perikanan memiliki keterkaitan kedepan yang cukup besar terhadap kegiatan produksi sektor lain (Renstra Dinas Perikanan Kab.SBT).

Berikut hasil wawancara lanjutan dengan Sekretaris Dinas Perikanan Kab. SBT, Bapak H. Jahdi Marasabessy, S.Pi., MMP.:

“Sebenarnya mbak, kalau untuk penggunaan secara fisik teknologi modern untuk para masyarakat nelayan, kami belum bisa menyediakan, karena terhalang berbagai macam faktor, baik dari budgeting begitupun dengan SDM para nelayan tersebut, namun kami selalu berupaya dalam memberikan pengetahuan dan sosialisasi tentang IPTEK bagi para nelayan melalui program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan SDM masyarakat nelayan kami, dan sebagian sudah berjalan dengan tahapan sosialisasi, seperti pelatihan, penyuluhan dan pengarahan.” (Wawancara 30 Juni 2021, Jam 11.35).

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa Dinas Perikanan telah mengupayakan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga nelayan di Kampung Nelayan dengan cara memberikan pembinaan bimbingan IPTEK dan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dengan pembinaan serta pelatihan yang menjamin sumber daya perikanan yang keberlanjutan serta meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan.

Implementasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kab. SBT adalah pembinaan masyarakat nelayan terkait alat tangkap (ramah lingkungan) dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wilayah yang menjadi konservasi. Para nelayan turut berperan aktif dalam pengelolaan daerah larang tangkap. Nelayan juga relatif lebih mampu membangun *networking* dalam menjual hasil tangkapannya sendiri tanpa melalui pihak ketiga (pemodal atau tengkulak).

(2). Pengembangan aktivitas ekonomi lokal berbasis komoditi perikanan unggulan. Peran dari Dinas Perikanan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi berbasis komoditi perikanan unggulan ialah melalui pemetaan wilayah penangkapan berdasarkan potensi sumber daya laut, serta jenis komoditi perikanan yang dihasilkan oleh setiap Kecamatan di Kab. SBT, dengan demikian lebih memudahkan Dinas Perikanan dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya lautnya sendiri. Potensi sumber daya laut di Kab.SBT tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.

Berdasarkan Gambar 2 tersebut, Kecamatan Bula merupakan Kawasan Pengembangan Perikanan II, yang meliputi Desa Bula dan Desa Sesar (Kampung Nelayan). Di kampung nelayan, hasil produksi perikanan yang paling banyak adalah ikan tuna, dikarenakan nelayan di kampung nelayan tersebut merupakan nelayan tuna. Oleh karena itu, dari Dinas Perikanan terus berupaya untuk mengembangkan potensi sumber daya perikanan yang dihasilkan oleh para nelayan setempat, dengan pemetaan kawasan pengembangan perikanan guna menciptakan perikanan yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kab.SBT. Serta, peran pemerintah dilakukan melalui pembukaan jaringan atau *networking* pasar luar, yang

Gambar 2
Peta Pengembangan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur



Sumber: Data Dinas Perikanan Kab.SBT.

nantinya lebih memudahkan masyarakat dalam proses penjualan dan distribusi hasil tangkapan mereka.

Selain itu, Dinas Perikanan Kab. SBT sebelumnya telah membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI), untuk memudahkan masyarakat dalam memasarkan hasil tangkapan. Namun demikian, hasil wawancara dengan nelayan di kampung nelayan diketahui, fasilitas yang sudah tersedia yakni TPI masih belum dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka. Nelayan di sana lebih bergantung pada penada atau tengkulak untuk menjual hasil tangkapan mereka. Dengan demikian, tidak semua nelayan di sana merasakan kegunaan dari TPI yang telah dibangun oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kab. SBT.

Sebagaimana diperkuat dari informan yang peneliti lakukan melalui wawancara langsung dengan Kepala Bidang Penangkapan Dinas Perikanan, Bapak La Mance, S.Pi.:

“Kami terus berupaya dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat nelayan di Kampung Nelayan, yaitu dengan membangun networking atau jaringan pasar luar dan pemberian sarpras alat tangkap maupun pembangunan TPI bagi nelayan, namun memang sebagian nelayan ini mereka lebih memilih untuk dijual ke tengkulak tuna dibandingkan di TPI” (Wawancara 5 Juli 2021, Jam 08.30 WIT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penangkapan, La Mance S.Pi., diketahui bahwa cara yang telah diusahakan oleh Dinas Perikanan tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, karena memang masih banyaknya nelayan di Kab.SBT khususnya di kampung nelayan yang terikat dengan penada atau pedagang pengumpul dalam menjual hasil tangkapan ikan, terutama ikan tuna yang lebih mendominasi. Hal tersebut menyebabkan TPI di kampung nelayan tidak terpakai dan akhirnya terbengkalai selama beberapa tahun terakhir ini.

Kurangnya minat para nelayan dalam memanfaatkan TPI ini diakibatkan oleh masih kurangnya fasilitas yang mendukung pengelolaan hasil tangkapan mereka, salah satunya ialah *cool room*. Banyak masyarakat nelayan yang tidak mau terbebani, karena modal usaha yang minim dan hasil ikan yang sampai ke darat biasanya dilakukan pada malam hari, menjadi salah satu faktor penyebab enggan para nelayan yang menjual hasil tangkapnya langsung ke TPI, disebabkan pelelangan ikan yang dilakukan pada siang hari, sehingga dengan rentang waktu yang cukup lama tersebut, mengharuskan para nelayan untuk mengeluarkan biaya tambahan penanganan ikan agar kualitas mutunya tetap terjaga. Selain itu, upaya dari Dinas Perikanan Kab. SBT dalam mengelola hasil perikanan tangkap para nelayan secara berkelanjutan juga tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Perikanan, dikarenakan terhambatnya pada UU yang telah membatasi kewenangan untuk Dinas Perikanan melalui pemerintah kabupaten.

Keempat, pelopor. Sebagai pelopor, Dinas Perikanan Kab. SBT mempunyai keharusan untuk menjadi panutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dinas Perikanan Kab.SBT harus bersikap bijak dan objektif demi lancarnya pembangunan kelautan dan perikanan. Peran sebagai pelopor, dapat ditunjukkan beberapa upaya sebagai berikut.

(1). Upaya dinas perikanan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan. Upaya penyampaian aspirasi masyarakat nelayan dalam hal ini Dinas Perikanan Kab. SBT menjadi wadah dalam menampung atau menyerap aspirasi masyarakat nelayan, yang kemudian nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan program dalam jangka pendek, menengah maupun jangka

panjang. Namun aspirasi dari masyarakat nelayan ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya oleh Dinas Perikanan Kab.SBT karena terbenturnya dengan regulasi yang ada, regulasi yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, beberapa kewenangan di bidang perikanan kabupaten telah menjadi kewenangan pusat. Salah satu contohnya urusan perikanan di bidang pengawasan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat, yakni sebesar 70% dan provinsi sebesar 30% tanpa melibatkan pemerintah kabupaten. Begitupun juga dengan urusan Perikanan Tangkap yang hanya diberikan kewenangan sebesar 10% kepada pemerintah kabupaten.

Berikut hasil wawancara lanjutan dengan Kepala Bidang Penangkapan Dinas Perikanan, Bapak La Mance, S.Pi.:

“Hadirnya UUNo 23 Tahun 2014 ini tentunya memberikan ruang gerak yang lebih terbatas bagi kami, sehingga mengurangi keterlibatan kami Dinas Perikanan khususnya di bidang tangkap dalam mengelola sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Sehingga untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat nelayan ini kami hanya bisa melalui sosialisasi maupun pemberian bansos kepada masyarakat” (Wawancara 5 Juli 2021, Jam 09.00 WIT).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa regulasi tersebut tentunya berdampak terhadap kinerja Dinas Perikanan yang menjadi kurang efektif. Selain itu Dinas Perikanan Kab.SBT dalam halnya menampung aspirasi masyarakat nelayan, masih kurang berjalan dan belum maksimal seperti apa yang diharapkan masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan oleh Undang-undang tersebut yang akhirnya menjadi alasan yang membatasi ruang gerak dari Dinas Perikanan Kab. SBT. Hal tersebut menyebabkan aspirasi dari

masyarakat nelayan tidak dapat ditindaklanjuti secara langsung dan prosesnya pun lebih sulit, karena perlu adanya koordinasi dan penyesuaian visi antara Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Maluku dan Dinas Perikanan Kab.SBT.

(2). Sinergitas rencana strategis (renstra) Dinas Perikanan terhadap peran dan implementasi ketahanan ekonomi keluarga masyarakat nelayan. Tingkat kemakmuran ekonomi keluarga masyarakat nelayan, dapat digambarkan dari kemampuan keluarga yang kondisi kebutuhan keluarganya terpenuhi, demi keberlangsungan hidup keluarganya secara nyaman dan berkelanjutan. Kehidupan yang nyaman dapat terwujud bila kondisi rumah yang ditempati oleh keluarga tersebut layak untuk dihuni. Dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan Kab.SBT mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, yakni hasil budidaya perikanan, hasil perikanan tangkap, dan pasca panen hasil perikanan

Dari penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan tersebut menunjukkan bahwa sasaran yang dimaksud ialah demi meningkatnya produksi perikanan dan kelautan. Sejalan dengan itu, keberlanjutan kehidupan keluarga yang terjamin, terjawab jika keluarga tersebut selalu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk untuk menjamin anggota keluarganya dalam hal pendidikan, sedangkan untuk mengatasi berbagai ketidakpastian hidup di masa mendatang, maka keluarga nelayan selayaknya mempunyai tabungan dalam jumlah yang lebih, serta adanya jaminan kesehatan berupa asuransi kesehatan dan lain sebagainya.

Sejalan dengan itu, kondisi sosial masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula Kab.SBT sejauh ini masih terbilang

semi modern, dan termasuk dalam desa swakarya, yakni kampung nelayan yang sedang berkembang, keadaan kampungnya yang terlihat lebih maju jika dibandingkan desa swadaya. Para nelayan di sana, sudah mampu memasarkan hasil tangkapannya ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Perekonomian masyarakat di Kampung Nelayan Bula Kab.SBT masih terbilang cukup rendah, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang juga rendah, baik tingkat pendidikan yang rata-rata berada pada tingkat rendah yakni SD-SMP dan keterampilan yang terbatas, sehingga tidak mampu mengelola sumber daya perikanan yang ada, dikarenakan nelayan adalah sekelompok masyarakat nelayan yang menjalankan aktivitasnya di laut untuk menghasilkan pendapatan yang berasal dari sumber daya perikanan satu-satunya melalui hasil dari operasi penangkapan ikan dan biota lainnya.

Hal tersebut menyebabkan kehidupan ekonomi masyarakat di Kampung Nelayan Bula Kab.SBT hanya memiliki sumber pendapatan yang rendah, yang pastinya berdampak terhadap perekonomian keluarga nelayan. Kesejahteraan masyarakat nelayan ditentukan berdasarkan hasil produksi tangkapan dari nelayan tersebut. Karena dengan hasil tangkapan nelayan yang banyak, menunjukkan besarnya penghasilan yang dihasilkan, kemudian sebagian besar dari penghasilan tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Oleh sebab itu, dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga nelayan sangat ditentukan oleh penghasilan yang didapatkan oleh para nelayan.

Kelima, pelaksana. Peran pemerintah daerah, melalui Dinas Perikanan Kab. SBT sebagai pelaksana sendiri, dalam

pembangunan di bidang kemaritiman harusnya diciptakan melalui penyelenggaraan fungsi setiap instansi pemerintahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yang menyebabkan adanya keseimbangan dan pergerakan yang dinamis dalam roda pemerintahan. Peran yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kab. SBT selaku pelaksana dapat dilihat dari berbagai kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

(1). Pengawasan terhadap wilayah pengembangan potensi perikanan. Pengawasan adalah unsur terpenting dalam menjalankan suatu kegiatan. Oleh karena itu, setiap aspek dalam kehidupan manusia sesungguhnya telah diawasi dan manusia sendiri yang nantinya melakukan pengawasan terhadap apa yang ada di sekitar lingkungannya, sebagai salah satu metode dalam menilai apa yang dikerjakan orang lain maupun yang diri sendiri kerjakan. Peran dari Dinas Perikanan Kab.SBT dalam hal pengawasan, berdasarkan Perbup No.19/2017 sudah tidak dapat dijalankan lagi oleh Dinas Perikanan Kab.SBT, dikarenakan dengan adanya UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pemerintah pusat dan provinsi dibagi dalam Pengelolaan Urusan Pemerintahan bidang kelautan. Berikut hasil wawancara lanjutan dengan Kepala Bidang Penangkapan Dinas Perikanan, Bapak La Mance S.Pi.:

“Undang-undang No 23 ini terhadap kewenangan seharusnya di pertanyakan, karna sangat merugikan kami selaku daerah otonom. Bagaimana mungkin kami tidak punya hak di laut, akhirnya jika terjadi destruktif penggunaan alat dan bahan maupun cara yang merusak sumber daya dilaut, kami tidak punya kewenangan karena harus koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi. Dan hal tersebut sangat riskan karena jika terjadi

hal-hal di laut seperti kecelakaan pada nelayan kami, maka kami tidak punya hak dalam menangani hal tersebut, dan menurut saya ini sangat ironis. Oleh sebab itu perlunya pertengahan (batas) untuk Undang-undang No 23 ini, bagi kami untuk wilayah kabupaten” (Wawancara 5 Juli 2021, Jam 10.10 WIT).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui adanya keterbatasan dalam mengambil keputusan maupun tindakan oleh Dinas Perikanan Kab.SBT yang disebabkan oleh berlakunya UU No 23 ini yang kemudian segala bentuk kompleksitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat nelayan pun tidak bisa diatasi dengan baik, sehingga berdampak terhadap perekonomian nelayan. Upaya Dinas Perikanan Kab.SBT dalam hal pengawasan tentunya sejauh ini sudah dilaksanakan, salah satunya dengan pengawasan wilayah pengembangan perikanan yakni ada 4 (empat) daerah utama sentral perikanan, yaitu Bula, Seram Timur, Gorom dan Wakate, dengan melibatkan masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat dalam pengawasan wilayah laut mereka masing-masing.

Namun, sejak berlakunya UU No.23/2014 tentang Pemerintahan daerah yang membuat kewenangan manajemen wilayah laut oleh pemerintah kabupaten menjadi berkurang. Pemerintah kabupaten awalnya memiliki wilayah pengelolaan sejauh 0-4 mil, kini sudah dikembalikan ke pemerintah provinsi. Dengan demikian, wilayah pengelolaan provinsi menjadi 0-12 mil. Hal tersebut tentu berdampak terhadap ruang gerak pemerintah daerah dan membatasi kreativitas Dinas Perikanan untuk melihat kompleksitas masyarakat nelayan yang ada di Kab.SBT guna meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya nelayan di kampung nelayan.

(2). Pengendalian mutu hasil perikanan. Kampung nelayan di Kecamatan Bula Kab. SBT dalam hal peningkatan hasil produksi, mereka terkendala dengan teknologi. Seperti keterbatasan listrik, kebutuhan listrik untuk mendukung berjalannya sistem rantai dingin. Kebutuhan listrik untuk *cold storage* seharusnya dapat digunakan untuk menampung hasil ikan tangkap, namun ketersediannya terbatas. Akibatnya nelayan kesulitan mempertahankan mutu hasil tangkapannya. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelola TPI, dengan Bapak Darwis, S.IP. sebagai berikut:

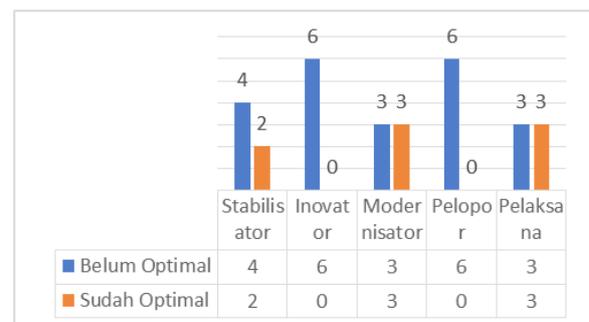
“Dalam penjagaan mutu produksi perikanan di SBT ini mbak, selain memberikan pembinaan kami dari pemerintah daerah juga sudah berupaya guna menjaga kualitas hasil tangkapan para nelayan melalui penyediaan cold storage di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Bula, Gorom dan Kesui. Namun beberapa tahun terakhir ini mengalami stagnan salah satu penyebabnya karena keterbatasan listrik karena masih menunggu kerjasama dengan PLN” (Wawancara 7 Juli 2021 Jam 09.00 WIT).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Dinas Perikanan Kab.SBT dalam proses penjagaan mutu hasil perikanan masih berupa pembinaan, sosialisasi dan penyediaan sarana *cold storage*, namun untuk penerapan teknis, Dinas Perikanan belum menyediakan. Mengingat sumber daya manusia masyarakat nelayan yang masih rendah dan adanya keterbatasan listrik ini, membuat para nelayan tidak dapat menjamin mutu hasil tangkapan ikan yang mereka tampung. Namun karena rata-rata para nelayan di Kecamatan Bula mempunyai kebiasaan melakukan transaksi jual beli ikan saat sampai di darat, dengan demikian dalam penjagaan mutu ikan pun tidak terlalu dipikirkan.

Oleh karenanya, terjawab bahwa jika peran pemerintah daerah, melalui Dinas Perikanan tidak dapat memberikan bantuan yang begitu banyak kepada para nelayan, wajar saja jika para nelayan menjual hasil panen ikannya kepada tengkulak (pemodal). Demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian mutu hasil perikanan dari peran Dinas Perikanan Kab.SBT belum maksimal, dan masih dalam rentan waktu yang pendek serta capaian yang diberikan belum begitu berdampak baik pada pemberian bantuan sarana dan prasaran, maupun modal, dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, perlu disadari buat semua pihak yang terlibat. Bahwa fungsi pengawasan perlu diperhatikan demi tercapainya pengendalian mutu hasil ikan yang efisien dan efektif.

Penjelasan tentang kelima peran Dinas Perikanan Kab. SBT tersebut di atas dapat ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3
Peran Dinas Perikanan Kab.SBT



Sumber: Data olahan peneliti, 2021.

Berdasarkan Gambar 3 tersebut dapat ditegaskan bahwa peran Dinas Perikanan Kab. SBT dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga nelayan di kampung nelayan, masih belum optimal, sebagaimana ditunjukkan pada peran stabilisator, inovator dan pelopor. Lebih lanjut, peran Dinas Perikanan selaku

modernisator dan pelaksana, mempunyai tingkat kedudukan yang sama.

Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Perikanan Kab.SBT belum dapat maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Keterbatasan pelaksanaannya, baik peran maupun implementasi kebijakan yang dinilai sudah tepat sasaran, namun kenyataannya masih terhambat dengan beberapa faktor, baik tergambar jelas dari informan, maupun dokumen Dinas, serta regulasi yang mengatur.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan

Ketahanan dapat diartikan sebagai kondisi tahan yakni tahan terhadap guncangan maupun ancaman baik bagi individu, kelompok, komunitas maupun bangsa. Indikator dari ketahanan itu sendiri terdiri dari: (1). Absorpsi: menahan guncangan, (2). Adaptasi: mampu beradaptasi dalam setiap kondisi dan lingkungan baru yang mengancam, (3). Transformasi: seorang individu atau komunitas mampu melakukan transformasi diri, (4). Strategi (keberlanjutan): memiliki strategi yang tahan serta mampu beradaptasi dan bertransformasi dari guncangan yang nantinya akan mengalami keberlanjutan (Armawi, 2021). Indikator tersebut sudah tentu berlaku dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga nelayan.

Peran dari pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kab.SBT, tentunya berimplikasi terhadap ketahanan ekonomi keluarga nelayan di Kampung Nelayan Bula. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, berikut implikasi dari peran Dinas Perikanan Kab.SBT terhadap ketahanan ekonomi keluarga nelayan, yang diukur melalui beberapa indikator yaitu tempat tinggal/kepemilikan rumah, pendapatan

keluarga, biaya pendidikan anak dan jaminan kesehatan keluarga (Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak, 2016). Masing-masing indikator ketahanan ekonomi keluarga dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu tahan, kurang tahan, dan tidak tahan (Romdiati dkk, 2010):

Pertama, tempat tinggal keluarga nelayan (kepemilikan rumah). Hak kepemilikan tanah atau rumah merupakan hal yang sangat penting dan memiliki berbagai nilai budaya dan sosial, akan sangat sulit dibayangkan jika masyarakat tanpa hak kepemilikan sebagai pendorong utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, umumnya rumah merupakan tempat tinggal yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, namun bagi masyarakat nelayan, rumah selain tempat perlindungan juga merupakan sarana pendukung aktivitas melaut. Sebagaimana peneliti sajikan hasil wawancara kepada masyarakat nelayan, Bapak Lahane Rumbia, sebagai berikut:

“Untuk tempat tinggal kami saat ini, masih numpang diatas tanah pemerintah mbk, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kapanpun akan digusur atau diambil alih pemerintah. Kami berharap, tempat tinggal yang seadanya ini, cukup membantu kami. Walaupun belum layak huni, mbk bisa lihat sendiri tempatnya, kotor dan bau, mudah-mudah pemerintah peduli akan tempat tinggal kami yang permanen nantinya”.
(Wawancara 13 Juli 2021 Jam 14.00 WIT).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mayoritas masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula, masih belum memiliki hak kepemilikan rumah, karena pada dasarnya wilayah pemukiman yang ditempati oleh nelayan tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah (PEMDA) Kab.SBT dan tidak menutup kemungkinan tanah pemukiman tersebut bisa

diambil kapan saja oleh Pemerintah untuk melakukan pembangunan lain.

Jika melihat pendapat dari Dinas Perikanan Kab.SBT, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perikanan, Bapak H. Jahdi Marasabessy, S.Pi., M.MP, berikut peneliti kutip sebagai berikut:

“Kami terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat nelayan, untuk layak huni maupun tempat tinggal (kepemilikan rumah), kami tidak bisa berperan aktif untuk mengambil keputusan maupun membuat kebijakan, semuanya kami kembalikan pada pemerintah daerah, yang secara otomatis menyesuaikan anggaran dan kebijakan dari semua pihak terkait, baik instansi vertikal maupun stakeholder lainnya”. (wawancara 30 juni 2021, Jam 10.00 WIT).

Berikut data Tabel 3 yang telah peneliti rangkum berdasarkan hasil wawancara dengan 3 kelompok nelayan terkait dengan tempat tinggal/kepemilikan rumah keluarga nelayan.

Data Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dari ke-3 kelompok nelayan yang telah peneliti wawancara, terkait

dengan kepemilikan rumah nelayan, sebagian besar memiliki ketahanan ekonomi keluarga yang masuk pada kategori kurang tahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran pemeritah melalui Dinas Perikanan Kab. SBT tidak dapat memberikan kontribusi yang banyak bagi masyarakat nelayan. Kepemilikan rumah untuk masyarakat nelayan, belum sepenuhnya diberikan bantuan yang bersifat permanen. Keluarga nelayan hanya sebatas menumpang untuk tempat tinggal, yang hak atas tanahnya ialah milik pemerintah.

Dalam konteks ketahanan (*resilience*), ketahanan ekonomi keluarga pada indikator tempat tinggal (kepemilikan rumah) dapat disimpulkan:

(1). Kemampuan absorpsi. Kemampuan absorpsi ialah ketika keluarga nelayan memiliki kepemilikan tanah atas rumah yang mereka tempati serta memiliki rumah yang layak huni, sehingga keluarganya dapat hidup aman tanpa ada gangguan. Namun, keluarga nelayan di kampung nelayan memiliki kondisi tempat tinggal yang cukup memprihatinkan, yakni rumah yang dimiliki sangat tidak layak

Tabel 3
Kepemilikan Rumah Keluarga Nelayan

No	Kelompok Nelayan	Informan	Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan di Kampung Nelayan Bula
			Kepemilikan Rumah
1	Kelompok Tuna	I.1	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah papan gantung
	Kelompok Tuna	I.2	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah papan gantung
	Kelompok Tuna	I.3	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah semi permanen
	Kelompok Tuna	I.4	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah papan
	Kelompok Tuna	I.5	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah papan semi permanen
2	Kelompok Fajar Timur	I.1	Tidak memiliki sertifikat tanah , jenis rumah papan gantung
	Kelompok Fajar Timur	I.2	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah papan gantung
	Kelompok Fajar Timur	I.3	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah papan
	Kelompok Fajar Timur	I.4	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah semi permanen
	Kelompok Fajar Timur	I.5	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah semi permanen
3	Kelompok Tatihu	I.1	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah papan gantung
	Kelompok Tatihu	I.2	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah papan gantung
	Kelompok Tatihu	I.3	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah papan
	Kelompok Tatihu	I.4	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah batu permanen
	Kelompok Tatihu	I.5	Tidak memiliki sertifikat tanah, jenis rumah papan gantung

Sumber: Olahan data Peneliti (2021)

huni serta rumah yang mereka bangun bukan diatas tanah mereka sendiri melainkan tanah Pemerintah Daerah Kab.SBT. Oleh karena itu, nelayan di Kampung Nelayan Bula belum memiliki kemampuan absorpsi setelah diukur melalui indikator tempat tinggal (kepemilikan rumah), sehingga tergolong belum memiliki ketahanan (*resilience*) baik individu maupun kelompok.

(2). Kemampuan adaptasi. Adaptasi dalam konteks ini adalah ketika masyarakat nelayan mampu menciptakan perubahan dalam kondisi lingkungan pemukiman yang mengakibatkan seseorang dalam suatu kelompok sosial dapat hidup dan berfungsi lebih baik dalam lingkungannya. Masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula tidak memiliki kemampuan adaptasi yang baik, karena dengan rumah mereka saat ini yang tidak memiliki status kepemilikan tanah, para nelayan tidak memiliki suatu perubahan yang bisa mereka lakukan untuk keberlanjutan hidup mereka ke depan.

(3). Kemampuan transformasi. Dalam konteks ketahanan, melalui kemampuan transformasi, masyarakat nelayan masih tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi kondisi rumah mereka yang masih tergolong tidak layak huni serta status kepemilikan tanah yang sampai saat ini masih belum dimiliki oleh para masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula, sehingga kemampuan transformasi yang dimiliki oleh keluarga nelayan tergolong belum memiliki ketahanan (*resilience*) yang tahan terhadap guncangan maupun ancaman.

(4). Strategi. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kab.SBT dalam mengatasi kondisi masyarakat nelayan ialah dengan pemberian bantuan dana dalam merenovasi rumah masyarakat nelayan agar lebih layak untuk dihuni, sedangkan

untuk status kepemilikan tanah para nelayan, dari Dinas Perikanan belum memberikan solusi terkait hal tersebut, namun Dinas Perikanan menyatakan bahwa mengenai status tanah tersebut, tidak terlalu menjadi masalah sebab sudah 1 dekade lebih, status tanah masyarakat di Kampung Nelayan Bula tidak pernah dipermasalahkan, dan para nelayan pun hidup dalam kondisi aman selama ini

Kedua, pendapatan keluarga nelayan. Masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula merupakan kelompok nelayan tradisional dan mayoritas masyarakatnya memiliki ketergantungan dalam menghasilkan pendapatan dari hasil produksi tangkapan ikan. Program pemberdayaan dari pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kab.SBT, tentu bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian keluarga nelayan di Kampung Nelayan Bula. Disajikan hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan, yakni Bapak M. Ali Rumakat, S.Pi sebagai berikut:

“Untuk dapat mensejahterakan pendapatan keluarga nelayan, kita harus berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk kebijakan yang dibuat dan yang akan dilaksanakan. Saat ini yang difokuskan, ialah program pemberdayaan pengembangan kapasitas nelayan dan peningkatan produksi alat tangkap. Dari 2 program ini saja, kami kesulitan untuk penerapannya, karena memang kendalanya ialah pandemi dan anggaran yang terbatas. Oleh karena itu, semoga pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa fokus untuk melanjutkan program tersebut” (Wawancara 2 juli 2021, Jam 09.00 WIT).

Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kab.SBT tersebut, masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan

masyarakat nelayan. Mayoritas keluarga nelayan tersebut, masih memiliki masalah perekonomian yang sampai saat ini masih belum membaik, apalagi di tengah kondisi Indonesia yang mengalami masalah kesehatan (Pandemi Covid-19), sehingga kompleksitas masalah nelayan makin bertambah dan berdampak pada setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat nelayan.

Data tentang pendapatan rata-rata keluarga nelayan per kelompok ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Data Pendapatan Rata-rata Keluarga Nelayan (per-kelompok)

No	Kelompok Nelayan	Pendapkeluarga per/Bulan (rata-rata)	
		Sebelum Pandemi	Setelah Pandemi
1.	Kelompok Tuna	Rp. 5.000.000,00	Rp. 320.000,00
2.	Kelompok Fajar Timur	Rp. 5.100.000,00	Rp. 290.000,00
3.	Kelompok Tatiyu	Rp. 5.200.000,00	Rp. 280.000,00

Sumber : Data olahan Peneliti, 2021.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat nelayan, Bapak Ali Siolimbona, peneliti kutip sebagai berikut:

“Hasil nelayan kami selama pandemi ini sangat menurun, jangankan untuk menabung, keseharian kami saja sangat kurang. Biasanya kami bisa mendapatkan Rp. 200.000,- perhari. Namun sekarang terbalik, sebulan kami malah bisa mendapatkan Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- (Wawancara 12 Juli 2021, Jam 16.00 WIT).

Berdasarkan data pendapatan keluarga nelayan yang telah disajikan di atas, menunjukkan bahwa pendapatan keluarga nelayan di Kampung Nelayan Bula mengalami penurunan yang sangat signifikan. Akibat pandemi ini, memberikan pengaruh pada

pendapatan nelayan, salah satunya kegiatan produksi dan distribusi hasil perikanan yang dibatasi oleh pemerintah daerah, dengan demikian aktivitas nelayan pun dihentikan sementara. Selain masalah kesehatan (pandemi), program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kab. SBT, fakta yang peneliti temukan di lapangan ialah masih banyak nelayan yang kesulitan dalam membiayai kebutuhan keluarganya, untuk pergi melaut saja masih kesulitan, karena harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar minyak dan kebutuhan tambahan lainnya saat melaut. Hal tersebut menandakan bahwa Dinas Perikanan Kab.SBT masih belum optimal dalam membantu perekonomian keluarga nelayan.

Pada data Tabel 5 pendapatan keluarga nelayan yang telah peneliti rangkum dari 3 kelompok nelayan, berdasarkan hasil wawancara di lapangan, terkait dengan pendapatan keluarga nelayan.

Berdasarkan data Tabel 5 dapat diketahui bahwa dari ke-3 kelompok nelayan yang telah peneliti wawancara, terkait dengan pendapatan keluarga nelayan di Kampung Nelayan Bula, memiliki ketahanan ekonomi keluarga yang masuk pada kategori kurang tahan. Oleh karena itu, peran Dinas Perikanan Kab. SBT dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga nelayan masih dikatakan belum optimal, sebab pendapatan keluarga dalam hal ketahanan ekonomi keluarga ini lebih ditekankan pada kecukupan penghasilan keluarga. Namun, keluarga nelayan di Kampung Nelayan Bula masih hidup dengan serba kekurangan dan tidak berkecukupan. Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya dinilai secara objektif saja namun juga secara subjektif.

Tabel 5
Pendapatan Keluarga Nelayan

No	Kelompok Nelayan	Informan	Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan di Kampung Nelayan Bula
			Pendapatan per/bulan
1	Kelompok Tuna	I.1	Rp.300.000
	Kelompok Tuna	I.2	Rp. 250.000
	Kelompok Tuna	I.3	Rp.300.000
	Kelompok Tuna	I.4	Rp.200.000
	Kelompok Tuna	I.5	Rp.300.000
2	Kelompok Fajar Timur	I.1	Rp.300.000
	Kelompok Fajar Timur	I.2	Rp.350.000
	Kelompok Fajar Timur	I.3	Rp. 350.000
	Kelompok Fajar Timur	I.4	Rp.250.000
	Kelompok Fajar Timur	I.5	Rp.200.000
3	Kelompok Tatihu	I.1	Rp.300.000
	Kelompok Tatihu	I.2	Rp.250.000
	Kelompok Tatihu	I.3	Rp. 350.000
	Kelompok Tatihu	I.4	Rp.300.000
	Kelompok Tatihu	I.5	Rp.200.000

Sumber : Data olahan Peneliti (2021)

Dalam konteks ketahanan (*resilience*), ketahanan ekonomi keluarga pada indikator pendapatan keluarga nelayan dapat disimpulkan:

(1). Kemampuan absorpsi. Kemampuan absorpsi dalam aspek pendapatan dilihat dari penghasilan nelayan sehari-hari yang dihasilkan dari melaut guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula selain sebagai nelayan tangkap ikan, mereka juga merupakan nelayan tuna yang setiap tahunnya mampu memproduksi hasil tangkapan senilai satu ton. Namun, munculnya pandemi covid-19 menyebabkan aktivitas para nelayan selama melaut menjadi berkurang sehingga pendapatan mereka mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, para nelayan tersebut belum memiliki kemampuan absorpsi yang baik sehingga masih tergolong belum memiliki ketahanan (*resilience*).

(2). Kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula dalam aspek pendapatan masih belum mampu dalam mengatasi guncangan dan hambatan yang disebabkan oleh pandemi covid-19, karena yang bisa dilakukan nelayan saat ini adalah mendapat uluran tangan dari pemerintah daerah. Namun, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini, untuk meningkatkan kondisi perekonomian keluarga, mereka masih sangat kesulitan.

(3). Kemampuan transformasi. Keterbatasan akan pengetahuan, pada akhirnya menyulitkan mereka dalam memiliki kemampuan untuk bertransformasi dalam meningkatkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi pandemi juga sangat terbatas. Sumber pendapatan keluarga nelayan, selain dari hasil tangkapan selama melaut, juga berasal dari hasil olahan istri nelayan berupa ikan asap yang nantinya dijual untuk membantu ekonomi keluarganya. Namun, karena kondisi pandemi saat ini sehingga menyebabkan banyak nelayan yang tidak melaut dan pendapatan yang dihasilkan juga berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, serta para istri nelayan pun belum dapat membantu dalam konteks produksi ikan asap. Oleh karena itu, masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula tergolong memiliki ketahanan (*resilience*) yang kurang baik.

(4). Strategi. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kab.SBT dalam mengatasi kontribusi negatif dalam hal kemampuan absorpsi, adaptasi dan transformasi dari segi pendapatan keluarga nelayan di tengah pandemi saat ini ialah melalui peningkatan kapasitas nelayan dalam hal memberdayakan sumber daya manusianya, peningkatan kapasitas alat tangkap nelayan,

sebab alat tangkap merupakan faktor utama yang mempengaruhi alat tangkap dan dapat digunakan dan difungsikan sebaik mungkin oleh masyarakat nelayan dan pemberian bantuan dana sosial bagi para keluarga nelayan yang terdampak covid-19. Strategi tersebut dijalankan guna untuk meningkatkan dan memulihkan perekonomian masyarakat nelayan yang menempati Kampung Nelayan Bula dalam waktu jangka panjang serta berkelanjutan

Ketiga, biaya pendidikan anak. Di era globalisasi saat ini, pendidikan merupakan hal yang diutamakan oleh setiap orang, baik yang mampu ataupun yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat nelayan yang dikenal sebagai kelompok marginal dan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di Indonesia, dengan demikian dalam aspek pembiayaan pendidikan anak menjadi suatu pertimbangan yang berat bagi keluarga nelayan.

Untuk itu, peneliti sajikan kutipan wawancara kepada masyarakat nelayan, yakni Bapak La Ode Sudirman dalam pandangan mereka mengenai pendidikan. Sebagai berikut:

“Anak-anak kami selesai SD maupun SMP, kami libatkan untuk melaut. Jangankan untuk melanjutkan sekolah mereka, untuk biaya hidup kami sekeluarga sehari-hari pun sangat terbatas. Kami berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah, untuk sekolah gratis, baik negeri maupun swasta. Minimal sampai lulus SMA saja, karena anak-anak kami juga tidak bisa melamar atau mencari kerja yang diluar sektor laut, persaingan saat ini kan minimal SMA, sama Sarjana mbak. (Wawancara 12 juli 14.00 WIT).

Jika dilihat dari perspektif dari pemerintah daerah. Dalam hal ini ialah Dinas Perikanan Kab.SBT. sebagaimana hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan

Keuangan, yakni Bapak M. Ali Rumakat, S.Pi, peneliti kutip sebagai berikut:

“Kami saat ini belum fokus pada pendidikan, memang hal ini fokusnya ialah Dinas Pendidikan, dan pastinya kembali lagi pada Anggaran, yang saya sampaikan tadi. Bagaimana mungkin kami bisa memberikan bantuan yang banyak dan berdampak langsung pada masyarakat nelayan, sedangkan dari pemerintah daerah saja, secara penganggaran sangat terbatas dan minim sekali. Bisa dilihat anggaran yang tersedia untuk beberapa program saja, dan itupun program tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ditengah covid-19”. (Wawancara 2 juli 2021, Jam 09.00 WIT).

Berikut data grafik Gambar 4 yang telah peneliti rangkum berdasarkan hasil wawancara dengan 3 kelompok nelayan, terkait dengan pembiayaan Pendidikan anak:

Gambar 4
Biaya Pendidikan Anak Keluarga Nelayan



Sumber : Olahan data peneliti, 2021.

Berdasarkan data grafik Gambar 4 tersebut diketahui bahwa biaya pendidikan keluarga anak nelayan, sebagian besar keluarga nelayan memiliki ketahanan ekonomi keluarga yang masuk pada kategori kurang tahan. Sebagaimana data yang peneliti temukan di lapangan, bahwasanya keluarga masyarakat

nelayan di Kampung Nelayan Bula, memiliki tingkat pendidikan paling tinggi SD-SMP. Hal ini disebabkan oleh, pendapatan nelayan yang sangat minim sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya. Peran pemerintah daerah yang memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warganya untuk memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu masih perlu ditingkatkan. Dinas Perikanan Kab.SBT, selaku pemerintah daerah belum mampu mengatasi permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di kampung nelayan tersebut. Dengan demikian, ketahanan ekonomi keluarga nelayan dalam aspek biaya pendidikan anak, masuk dalam kategori kurang tangguh, sebab keberadaan anggota keluarga yang putus sekolah merupakan salah satu indikasi adanya masalah ekonomi dalam keluarga tersebut, walaupun penyebab putus sekolah tidak selalu karena alasan ekonomi, hal ini akan mempengaruhi daya tahan ekonomi keluarga yang rendah.

Dalam konteks ketahanan (*resilience*), ketahanan ekonomi keluarga pada indikator biaya pendidikan anak dapat disimpulkan:

(1). Kemampuan absorpsi. Dalam mengukur kemampuan absorpsi melalui aspek biaya pendidikan ialah diukur dari masyarakat nelayan yang mampu menyekolahkan anaknya pada pendidikan formal melalui hasil pendapatan yang dihasilkan dari hasil melaut. Masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula, berdasarkan hasil wawancara dengan 15 informan dan didukung oleh data dari Dinas Perikanan Kab.SBT, bahwasanya masyarakat nelayan disana memiliki tingkat pendidikan paling tinggi ialah SD-SMP. Sedangkan untuk pendidikan anak nelayan, mereka hanya mampu disekolahkan hingga jenjang SD-SMP

hanya sedikit yang sampai lulus SMA. Hal ini dikarenakan, pendapatan nelayan yang sangat rendah sehingga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari saja sudah tidak mampu, bagaimana untuk menyekolahkan anak mereka hingga selesai. Oleh karena itu, kemampuan absorpsi yang dimiliki oleh keluarga nelayan tersebut tergolong belum memiliki ketahanan (*resilience*) baik secara individu maupun kelompok.

(2). Kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi dalam aspek pendidikan anak diukur kemampuan nelayan yang mampu beradaptasi dan menciptakan perubahan dalam lingkungan masyarakat. Fenomena anak nelayan yang terjadi pada usia sekolah yang ikut bekerja di laut banyak ditemukan di wilayah pesisir. Hal ini juga dialami masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula, masalah tingkat pendidikan anak dan persepsi atau pandangan orang tua mengenai pendidikan anak di lingkungan nelayan, pada umumnya hanya sampai tingkat SMP. Hal ini dikarenakan pendapatan nelayan yang diperoleh setiap bulannya berbeda-beda tergantung pada kondisi alam, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab dari tingkat pendidikan para nelayan sangat rendah sehingga kesadaran terhadap pendidikan anak juga masih sangat minim.

(3). Kemampuan transformasi. Kemampuan transformasi masyarakat nelayan melalui indikator pendidikan anak, sejauh ini belum dimiliki oleh keluarga nelayan di Kampung Nelayan Bula. Meski di tengah kondisi pandemi saat ini, yang sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian mereka, namun para nelayan ini tetap pada profesinya sebagai nelayan tangkap dibandingkan mengganti profesi lain selain nelayan.

(4). Strategi. Strategi yang dilakukan Dinas Perikanan Kab.SBT selaku pemerintah daerah, dalam meningkatkan ketahanan masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula melalui aspek pendidikan tidak dapat dilakukan secara langsung, baik dalam pemberian dana bantuan untuk pendidikan anak nelayan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari daerah dan biaya pendidikan tentunya memakan biaya yang cukup besar, dan hal tersebut juga bukan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan melainkan seluruh instansi di Kab. SBT. Oleh karena itu, perlunya koordinasi antar instansi pemerintah daerah di Kab.SBT guna mengatasi persoalan pendidikan anak nelayan di Kab.SBT khususnya Kampung Nelayan Bula.

Keempat, jaminan kesehatan keluarga. Kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jika suatu negara memiliki masyarakat yang sakit-sakitan maka negara tersebut akan tertinggal, oleh karena itu, kesehatan merupakan hak setiap masyarakat dan mereka berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Sejalan dengan itu, jaminan kesehatan berupa BPJS, Asuransi kesehatan, dan lain sebagainya merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali masyarakat nelayan.

Hal tersebut diperlukan agar masyarakat nelayan tidak harus mengeluarkan dana yang banyak untuk pergi berobat. Selain BPJS, masyarakat nelayan biasanya memiliki “Kartu Asuransi Nelayan” yang berfungsi untuk sebagai jaminan kehidupan mereka selama melakukan aktivitas di laut. Namun berdasarkan data di lapangan, sebagian besar masyarakat nelayan belum memiliki kartu

asuransi tersebut, sehingga cukup riskan bagi nelayan saat pergi melaut, jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan nanti, para nelayan ini tidak bisa mengajukan kerugian yang sudah mereka alami, dan pada akhirnya nelayan secara mandiri yang mengatasi hal tersebut tanpa ada campur tangan dari dinas perikanan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Bapak H. Jahdi Marasabessy, S.Pi., MMP selaku Sekretaris Dinas Perikanan Kab.SBT, sebagai berikut:

“Kami telah memberikan beberapa solusi untuk jaminan kesehatan keluarga nelayan, akses kesehatan bisa diperoleh melalui BPJS, sedangkan untuk jaminan keselamatan kerja, kita buat kartu asuransi nelayan. Hanya saja, banyak masyarakat nelayan yang tidak pro-aktif untuk membuat kartu asuransi nelayan, dan melautnya mereka pun tanpa ada jaminan keselamatan jiwa. Sangat disayangkan sekali dan berbahaya, namun mau gimana lagi, kita menunggu mereka pulang melaut dulu, dan itu tidak tentu. Jadi untuk jempot bola pun sudah sangat tidak efektif sekali. (Wawancara 30 juni 2021, jam 14.00 WIT).

Berikut data Tabel 6 yang telah peneliti rangkum, berdasarkan hasil wawancara dengan 3 kelompok nelayan terkait dengan jaminan Kesehatan keluarga nelayan.

Berdasarkan data Tabel 6 tersebut diketahui bahwa dalam memiliki jaminan kesehatan keluarga nelayan, sebagian besar keluarga nelayan Bula, memiliki ketahanan ekonomi keluarga yang masuk pada kategori kurang tahan. Sebagaimana data yang peneliti temukan di lapangan, bahwasanya keluarga nelayan ini juga tidak memiliki tabungan keluarga yang digunakan untuk kebutuhan mendadak di masa yang akan datang, sebab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun mereka masih kesulitan, sehingga tidak memiliki keinginan menabung untuk masa

Tabel 6
Jaminan Kesehatan Keluarga Nelayan

No	Kelompok Nelayan	Informan	Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan di Kampung Nelayan Bula
			Jaminan kesehatan keluarga
1	Kelompok Tuna	I.1	Tidak memiliki tabungan, memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Tuna	I.2	Tidak memiliki tabungan, tidak memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Tuna	I.3	Tidak memiliki tabungan, tidak memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Tuna	I.4	Tidak memiliki tabungan, tidak memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Tuna	I.5	Tidak memiliki tabungan, memiliki kartu asuransi nelayan
2	Kelompok Fajar Timur	I.1	Tidak memiliki tabungan, memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Fajar Timur	I.2	Tidak memiliki tabungan, memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Fajar Timur	I.3	Tidak memiliki tabungan, memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Fajar Timur	I.4	Tidak memiliki tabungan, tidak memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Fajar Timur	I.5	Tidak memiliki tabungan, tidak memiliki kartu asuransi nelayan
3	Kelompok Tatihu	I.1	Tidak memiliki tabungan, tidak memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Tatihu	I.2	Tidak memiliki tabungan, tidak memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Tatihu	I.3	Tidak memiliki tabungan, tidak memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Tatihu	I.4	Tidak memiliki tabungan, memiliki kartu asuransi nelayan
	Kelompok Tatihu	I.5	Tidak memiliki tabungan, memiliki kartu asuransi nelayan

Sumber: Data Olahan Peneliti

depan. Dalam ketahanan ekonomi keluarga, juga perlu mempertimbangkan kesiapan dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang, karena menjadi salah satu variabel pembangunan ketahanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, peran Dinas Perikanan Kab. SBT melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan, masih belum mengatasi dan menjawab persoalan keluarga nelayan dalam menjamin kehidupan ekonomi di masa depan.

Dalam konteks ketahanan (*resilience*), ketahanan ekonomi keluarga pada indikator jaminan kesehatan keluarga dapat disimpulkan:

(1). Kemampuan absorpsi. Kemampuan absorpsi yang diukur melalui indikator jaminan kesehatan keluarga ialah ketika masyarakat nelayan mampu menjamin keselamatan dirinya selama melaut melalui Kartu Asuransi Nelayan (KAN) serta tabungan darurat yang akan digunakan untuk biaya kesehatan maupun saat kondisi tidak terduga sebagai jaminan untuk masa depan. Masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula, mayoritas tidak memiliki KAN, hal ini tentunya akan

merugikan para nelayan saat melaut karena keselamatannya sudah pasti tidak terjamin. Selain itu, kesadaran para nelayan dalam memiliki tabungan darurat kesehatan dalam jangka panjang juga tidak ada, hal ini dikarenakan pendapatan mereka yang juga sangat rendah sehingga tidak terpikirkan oleh para nelayan tersebut untuk memiliki tabungan. Oleh karena itu, masyarakat nelayan belum memiliki ketahanan (*resilience*) yang tahan jika terjadi ancaman atau guncangan di masa yang akan datang.

(2). Kemampuan adaptasi. Dengan tidak adanya Kartu Asuransi Nelayan (KAN) maupun tabungan untuk keperluan darurat sebagai jaminan kesehatan keluarga nelayan, menyebabkan masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula akhirnya tidak mampu untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. Terbatasnya mobilitas masyarakat pada saat PPKM kemarin mengharuskan masyarakat nelayan untuk tidak melaut untuk waktu yang cukup lama, sebab hasil dari tangkapan ikan mereka lebih sering didistribusikan ke

luar daerah sehingga berdampak terhadap permintaan dari pihak tengkulak maupun pemodal. Akhirnya para nelayan mogok untuk melaut dan akhirnya mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan serta mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya selama pandemi. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi nelayan di Kampung Nelayan Bula masih tergolong memiliki ketahanan (*resilience*) yang kurang tahan secara individu maupun kelompok.

(3). Kemampuan transformasi. Perubahan secara individu maupun kelompok atau komunitas bagi masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula Kab.SBT, tidak mampu memberikan perubahan-perubahan yang baru, transformasi yang diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kab.SBT ialah masyarakat nelayan dapat secara mandiri berkembang tanpa ketergantungan dari Dinas Perikanan. Kemampuan transformasi dari masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula melalui indikator jaminan kesehatan keluarga, masih belum dimiliki oleh nelayan di sana. Untuk itu, dalam mengatasi kesulitan ekonomi di tengah pandemi saat ini yang hanya bisa diharapkan oleh nelayan adalah bantuan dari pemerintah daerah. Kemampuan masyarakat nelayan dalam transformasi di tengah situasi pandemi saat ini masih sangat terbatas sehingga masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Bula tergolong memiliki ketahanan (*resilience*) yang kurang tahan baik secara individu maupun kelompok.

(4). Strategi. Strategi yang perlu dilakukan Dinas Perikanan Kab.SBT dalam meningkatkan ketahanan masyarakat nelayan melalui indikator jaminan kesehatan ialah melakukan pendataan ulang di beberapa desa di Kab.SBT khususnya di kampung nelayan, agar saat pembuatan Kartu Asuransi Nelayan

bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat nelayan tanpa terkecuali. Kemudian melakukan program pemberdayaan kepada masyarakat nelayan berupa sosialisasi dan pelatihan bagi nelayan dan istri nelayan dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada.

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga nelayan terlihat jelas sangat tergantung kepada peran dari pemerintah daerah, melalui Dinas Perikanan Kab.SBT berupa kebijakan yang diambil. Sejauh ini kebijakan yang dibuat, tidak dapat memberikan *feedback* yang baik, dari perannya sebagai pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengintervensi secara langsung, kemampuan atau mampu dalam pemberdayaan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat nelayan, maupun spektrum ancaman (AGHT) untuk mewujudkan ketahanan itu sendiri, sehingga Dinas Perikanan Kab.SBT belum memiliki suatu ketahanan.

Selain itu, masyarakat nelayan sendiri juga tidak dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada Pemerintah Daerah Kab. SBT, baik penyerapan dari kebijakan yang telah dibuat, sampai pada berbagai tantangan yang telah diberikan. Dari kedua hal tersebut, dapat dipahami bersama bahwa, peran tidak dapat dilaksanakan secara sendiri, baik dari Dinas Perikanan Kab.SBT yang memiliki kuasa penuh dalam penerapannya, karena perlunya kolaborasi lintas sektor, antar perangkat daerah, yakni instansi terkait, dan begitupun juga masyarakat nelayan Kampung Bula Kab.SBT, yang belum dapat mampu menjawab kebijakan dan tantangan yang diberikan, sehingga berdampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga nelayan yang menjadi kurang tahan. Untuk itu, harus ada

inisiasi dari kelompok masyarakat nelayan maupun individu nelayan untuk dapat tahan dan mampu dalam setiap guncangan yang ada sehingga mampu memiliki ketahanan secara individu maupun kelompok.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, peran Dinas Perikanan Kab. SBT dalam pemberdayaan keluarga nelayan di Kampung Nelayan Bula diukur berdasarkan 5 indikator peran, yaitu peran selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana. Dinas Perikanan berperan selaku stabilisator yang meliputi: (1). Menjaga stabilitas perekonomian masyarakat nelayan, (2). Menjaga ketertiban masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya perikanan yang berkelanjutan, (3). Pengendalian produksi perikanan tangkap masyarakat nelayan. Peran selaku inovator meliputi: (1). Program pengembangan perikanan tangkap, (2). Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, (3). Program pemberdayaan usaha masyarakat nelayan pesisir, (4). Program pemberdayaan masyarakat melalui gerakan gemar makan ikan. Peran selaku modernisator meliputi: (1). Penguasaan IPTEK melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, (2). Pengembangan aktivitas ekonomi lokal berbasis komoditi perikanan unggulan. Peran selaku pelopor meliputi: (1). Upaya Dinas Perikanan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan, (2). Sinergitas renstra dinas perikanan terhadap peran dan implementasi ketahanan ekonomi keluarga masyarakat nelayan. Serta peran selaku pelaksana meliputi: (1). Pengawasan terhadap wilayah pengembangan potensi perikanan, (2). Pengendalian mutu hasil perikanan.

Namun, kebijakan yang dibuat tidak dapat memberikan feedback yang baik, dari peranannya sebagai pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengintervensi secara langsung, kemampuan atau mampu dalam pemberdayaan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat nelayan, serta spektrum ancaman (AGHT) untuk mewujudkan ketahanan itu sendiri sehingga Dinas Perikanan Kab.SBT masih belum memiliki suatu ketahanan.

Kedua, implikasi peran Dinas Perikanan Kab.SBT dalam pemberdayaan nelayan guna meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga nelayan, belum memberikan hasil positif bagi kondisi perekonomian keluarga nelayan, yang ditunjukkan oleh 4 indikator ketahanan ekonomi keluarga meliputi: (1). Tempat tinggal/kepemilikan rumah, (2). Pendapatan Keluarga, (3). Pendidikan Anak, (4). Jaminan kesehatan keluarga, yang masih kurang baik. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan peran Dinas Perikanan Kab.SBT diperlukannya beberapa faktor pendukung guna mencapai keberhasilan peran dinas perikanan serta membantu mendorong perekonomian daerah melalui pembangunan daerah berbasis kelautan dan perikanan yakni faktor sumber daya perikanan (SDP), faktor sumber daya manusia (SDM) dan faktor kebijakan pemerintah (penganggaran).

Selanjutnya, direkomendasikan hal sebagai berikut.

Pertama, untuk Dinas Perikanan Kab. SBT perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor kepada stakeholder yang ada, terutama dalam perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, begitupun juga dengan pengawasan yang diberikan. Peraturan yang ada lebih dioptimalkan dengan diperlukannya kesadaran bersama bahwa sebagai ASN, dalam fungsi pelayanan publik kepada masyarakat

perlu ditingkatkan sepenuh hati. Fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, belum dapat digunakan seoptimal mungkin oleh nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. dan H. Hikmat, 2001, *“Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat”*: Modul Latihan. Humaniora Utama Perss (HUP)
- Armawi, A., 2021, *Kata Kunci Ketahanan, Materi Kuliah: Teori Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Prodi Ketahanan Nasional.
- Biddle, B.J dan E.J. Thomas, 1966, *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley
- Data Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur, 2021, Naskah Publikasi: Laporan Realisasi Program Kegiatan.
- Kaswandi, 2017, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019, *Satu Data Produksi*. Pusat Data, Statistik dan Informasi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
- Lemhannas, 1997, *Ketahanan Nasional*, Jakarta : Balai Pustaka - Lemhanas.
- Mat, Red, 2017, *Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia*. Di akses 25 Desember 2021, dari <<https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim-dengan-Kepulauan-Terbesar-di-Dunia>>
- Milles, M.B dan M.A. Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Romdiati H, Mita Noveria, Bayu Setiawan, Ade Latifa, Fitranita, Meirina Ayumi Malamassam, Inayah Hidayati, 2010, *“Perubahan Struktur Penduduk dan Strategi Adaptasi dalam Konteks Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.”*
- Siswanto, 2008, *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Siagian, Sondang P., 2003, *Administrasi Pembangunan (Konsep Dimensi, dan Strateginya)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Suyono, 1991, *“Butir-Butir Arahan BKKBN pada Pembukaan Rapat Penyusunan Rencana Kampanye Keluarga Kecil Sejahtera dan Kampanye Keluarga Kecil Mandiri”*.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triaji, 2021, *Pemerintah Siapkan Peta Jalan 2045, RI Jadi Poros Maritim Dunia*. Diakses 25 Desember 2021, dari <<https://m.bizlaw.id/read/48210/Pemerintah-Siapkan-Peta-Jalan-2045-RI-Jadi-Poros-Maritim-Dunia-Widodo-Setiadi-Kita-tidak-Memunggungi-Laut-Lagi>>.

Zarita Kaulika R Wattimena, Rustadi, Suadi -- Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan (Studi Pada Kampung Nelayan Di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Informan (dalam tulisan):

1. Bapak H. Jahdi Marasabessy, S.Pi, M.MP
2. Bapak La Mance, S.Pi

3. Bapak M. Ali Rumakat, S.Pi
4. Bapak Lahane Rumbia
5. Bapak Ali Siolimbona
6. Bapak La Ode Sudirman
7. Bapak Darwis, SIP